

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainudin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, Jimly. (2014). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, Jimly. (2013). *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Asshiddiqie, Jimly. (2014). *Pengenalan Tentang DKPP Untuk Penegak Hukum*”, Jakarta: Pers DKPP.

Asshiddiqie, Jimly. (2014). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika.

Diantha, Made Pasek. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Harjono. (2008). *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Huda, Ni'matul. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Isharyanto. (2015). *Hukum Kelembagaan Negara*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Janedjri, M. Gaffar. (2013). *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konpress.

Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum..* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mewoh, Ardiles. (2017). *Pemilu Dalam Prespektif Penyelenggara*. Jakarta: Perludem.

Muhammad, Abdul Kadir. (2006). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Prasetyo, Teguh. (2018). *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, Jakarta: Rajawali Pers Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal

Anjania, Jihan. (2019). *Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Menciptakan Pemilu Yang Demokratis di Indonesia”*, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 2

Chakim, M Lutfhi. (2014). *Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai peradilan etik*. Jurnal Konstitusi Volume 11 Nomor 2.

Darwis, Salwan. (2015). *Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013*, Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 1, Maret.

Ditayani, Putu Eva. (2018). *Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia*. Jurnal Panorama Hukum Vol 3 No 1.

- Feriyani, Nora. (2019). *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bagi Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilu*. Badamai Law Journal Vol 4 Issues 1.
- Ismail dan Fakhris Lutfianto Hapsoro. (2021). *Paradigma Makna Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu*”, *Justitia Et Pax Jurnal Hukum* Volume 37 Nomor 2.
- Rajab, Achmadudin. (2016). *Gagasan Penegakan Etika Bagi Peserta Pemilihan Sebagai solusi maraknya Politik Uang dalam Pemilihan*, *Jurnal Etika Dan Pemilu* Volume 2 Nomor 3.
- Muntoha. (2009). *Demokrasi dan Negara Hukum*, *Jurnal Hukum* Nomor 3 Volume 16 Juli.
- Ngutra, Theresia. (2016). *Hukum dan Sumber-sumber Hukum*, *Jurnal supremasi* Volume XI Nomor 2, Oktober..
- Nurdin, Maharani. (2019). *Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu*. *Jurnal Hukum* Volume 5 Nomor 2.
- Nurhaini, Elisabeth. (2010). *Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan*. *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 22 Nomor 2.
- Puspitasari, Dyan. (2018). *Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Menjaga Kemandirian dan Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia*. *Jurnal Lentera Hukum* Volume 5 Issue 3.

Risnain, Muh. (2019). *Pengembangan Hukum Pemilu Berintegritas*. Jurnal Hukum Pemilu Volume 6 Nomor 3

Sukriono, Didik. (2019). *Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang Volume II Nomor I.

Syarwani, Arif. (2016). *Pentingnya Penegakan Kode Etik Peserta Pemilu*. Jurnal Etika dan Pemilu Volume 2 Nomor 3.

Wahid, Abdul. (2016). *Kode Etik Peserta Pemilu Sebagai Penguatan Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Etika dan Pemilu Volume 2 Nomor 3.

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Lainnya

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906)

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338)

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404)

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 291)

Putusan Badan Pengawas Pemilu Nomor: 83/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 154-02-2020/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Keputusan Presiden No. 34/P Tahun 2020 Pemberhentian Tidak Hormat Anggota KPU Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020.

Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 01/PHPU-PRES/ XVII/2019. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

D. Tesis

Jangi, Abdul Rahim. (2019). *Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum,*

Yogyakarta: Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

E. Website

- Pers DKPP. (2013). <https://dkpp.go.id/dkpp-perkenalkan-perbedaan-barang-bukti-dan-alat-bukti/#:~:text=%E2%80%9CAlat%20bukti%20ini%20dapat%20berupa,etika%2C%E2%80%9D%20jelas%20Nur%20Said.> (Diakses 23 Januari 2022. Pukul 09.00 WIB)
- Pers DKPP. (2019). <https://dkpp.go.id/aspek-aspek-yang-mendominasi-pelanggaran-kode-etik-penyelenggara-pemilu/> , (Diakses 10 November 2021, Pukul 21.00 WIB)
- Pers DKPP. (2020). <https://dkpp.go.id/prof-muhammad-prinsip-persidangan-dkpp-cepat-terbuka-sederhana-dan-tanpa-biaya/>. (Diakses 14 Januari 2022. Pukul 06.32 WIB)
- Pers DKPP. (2020). <https://dkpp.go.id/prinsip-audi-et-alteram-partem-dalam-sidangdkpp/#:~:text=Sidang%20di%20DKPP%20memperhatikan%20prinsip,jawaban%20Teradu%E2%80%9D%2C%20jelas%20Muhammad.> (Diakses tanggal 15 Januari 2022, Pukul 07.00 WIB)
- Pers DKPP. (2021) <https://dkpp.go.id/konferensi-pers-laporan-kinerja-dkpp-tahun2021/#:~:text=Menurut%20Muhammad%2C%20per%204%20Desember,merupakan%20penerusan%20dari%20KPU%2FBawaslu.> (Diakses 10 Januari 2022, Pukul 18.30 WIB)